KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

2023

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

UNIT KERJA : **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ALFIAN BAKRAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **417030**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		**Rp.**	**490.000.000**
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
2.	Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
3.	Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 100.000.000		
4.	Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 25.000.000		
5.	Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		**Rp.**	**105.000.000**
1.	MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1.5 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2.	LAINNYA, POLIGON D5 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		**Rp.**	**8.700.000**
D. SURAT BERHARGA		**Rp.**	**----**
E. KAS DAN SETARA KAS		**Rp.**	**900.000**
F. HARTA LAINNYA		**Rp.**	**----**
Sub Total		**Rp.**	**604.600.000**
III. HUTANG		**Rp.**	**310.870.998**
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		**Rp.**	**293.729.002**

Catatan:

Dipindai dengan CamScanner

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Dipindai dengan CamScanner

KPK 2023

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HELENA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 888050

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	3.250.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/208 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/400 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
3. Tanah Seluas 250000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250000 m2/60 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	519.000.000
1. MOBIL, PAJERO DAKAR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA METIG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
3. MOTOR, HONDA GTR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	74.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	—
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	818.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	—
Sub Total	Rp.	4.661.500.000
III. HUTANG	Rp.	—
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.661.500.000

Catatan:

Dipindai dengan CamScanner

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Dipindai dengan CamScanner